**Analisis Perbandingan LKPD Antara Kabupaten**

**Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora**

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Disusun Oleh Kelompok 2 :

Khairu Annisa (2201103010086)

Sofhia Intan Fadillah (2201103010097)

Nabila Anris Putri (2201103010065)

Ariq Shidqi (2201103010168)

Dosen Pengampu : Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si.



**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**DARUSSALAM, BANDA ACEH**

**2024/2025**

**ABSTRAK**

Analisis ini di lakukan untuk mengetahui dan membandingan LKPD antara Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Blora, yang terdiri dari unsur LKPD, LRA, LO, dan Neraca yang dimana setiap daerah kabupaten bisa berbeda nama akun dan rincianya. Dalam analisis ini, penulis menggunakan metode analisis antara 2 daerah di indonesia untuk menganalisi LKPD nya masing masing daerah agar dapat mengetahui hasil dari LKPD, LRA, LO, dan Neraca antara kedua daerah.

Penulis menemukan salah satu salah satu karakteristik kualitatif dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Keterbandingan atau Comparatibility, artinya antar Pemerintah Daerah bisa di perbandingkan LKPD nya jika mengunakan struktur dan kebijakan akutansi yang sama. Hasil analisis LKPD ini akan menunjukan bahwa kinerja keuangan pemda antara dua kabupaten ini akan berdampak atau tidaknya kepada indikator seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana, yang dimana akan di terapkan nya metode dan kebijakan yang tepat untuk masing masing daerah.

**Kata Kunci :** LKPD, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Blora, Perbandingan, Analisis

**ABSTRACT**

This analysis was carried out to find out and compare LKPD between districts. Fifty Cities and Districts. Blora, which consists of LKPD, LRA, LO and Balance Sheet elements, where each district can have different account names and details. In this analysis, the author uses an analysis method between 2 regions in Indonesia to analyze the LKPD of each region in order to find out the results of the LKPD, LRA, LO, and Balance Sheet between the two regions.

The author found that one of the qualitative characteristics in the Conceptual Framework for Government Accounting Standards is Comparability, meaning that regional governments can compare their LKPD if they use the same accounting structures and policies. The results of this LKPD analysis will show that the regional government's financial performance between these two districts will have an impact or not on indicators such as local original income, expenditure, and efficiency of fund management, in which appropriate methods and policies will be implemented for each region.

**Keywords:** LKPD, Limapuluh Kota Regency, Blora Regency, Comparison, Analysis

1. **Pendahuluan**

Peraturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagaiman isi dari UU Nomor 33 tahun 2004, pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follow function*). Dalam menjalani otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari hasil mengembangkan potensi yang dimilikinya, hal itulah yang menjadi penentuan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Dalam penyajian informasi mengenai pelaporan keuangan, pemerintah daerah harus menyajikannya secara transparansi, partisipatif, dan memiliki akuntanbilitas yang tinggi. Pemerintah mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampirkan di laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal, dan dapat dipahami agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Pada Akuntansi Pemerintahan juga dikenal dengan teori komparatif. Teori komparatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem akuntansi pemerintah di berbagai negara atau yurisdiksi. Perbedaan laporan keuangan daerah dapat dibandingkan dengan menganalisis LKPD dari kedua daerah yang akan dibandingkan. Teori komparatif dapat menunjukkan bagaimana pilihan basis akuntansi memengaruhi pencatatan transaksi pada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Salah satu karakteristik pelaporan keuangan pemerintah yaitu dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan dapat dikatakan berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Berdasarkan pemahaman dasar terkait laporan keuangan pemerintah dan informasi yang diperoleh mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), analisis sementara ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Blora. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Rasio efisiensi pendapatan asli daerah perlu dihitung untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Hasil analisis ini diharapakan dapat menambah wawasan mengenai pemahaman analisis kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora.

1. **Analisis LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota**
2. Menganalisis pengaruh belanja modal dalam LRA dan beban modal dalam LO terhadap kenaikan aset tetap dalam neraca pada tahun yang sama. Berikut penyajian LRA dan LO tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LRA | 2020 | 2019 | % |
| BELANJA MODAL |  |  |  |
| **JUMLAH BELANJA MODAL** | **152.712.089.645** | **252.910.521.752** | **-39,62%** |
|  |  |  |  |
| LO |  |  |  |
| BEBAN MODAL |  |  |  |
| Beban Pemeliharaan | 5.821.362.138 | 4.161.570.926 |  |
| Beban Bunga | 0 | 0 |  |
| Beban Penyusutan & Amortisasi | 125.359.640.103 | 118.342.195.533 |  |
| **JUMLAH BEBAN MODAL** | **131.181.002.241** | **122.503.766.459** | **7%** |

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bagian belanja modal menunjukkan penurunan aset tetap pada LRA sebesar -39,62% tahun 2020. Sedangkan pada LO mengalami kenaikan aset tetap karena LRA hanya mencatat realisasi pada tahun bersangkutan, sedangkan LO juga mencatat beban dari aset tetap sebelumnya.

1. Membandingkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan LO (Laporan Operasi)

A. Perbandingan pendapatan LRA dengan pendapatan dalam LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | 1.209.471.396.990,61 | 1.148.425.953.675,61 | 2,59% | 61.045.443.315 |

Nilai pendapatan yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Pendapatan lebih besar dicatat pada LO sebesar 2,59%. Umumnya LO akan mencatat nilai pendapatan lebih besar karena menggunakan basis akrual, akan tetapi jika pendapatan pada LRA lebih besar hal itu terjadi karena adanya pendapatan yang diakui oleh LRA dan tidak diakui oleh LO.

B. Perbandingan Belanja dalam LRA dengan beban dalam LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH BELANJA/BEBAN** | 1.143.091.242.841,00 | 1.117.778.198.948,03 | 1,12% | 25.313.043.893 |

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa belanja atau beban yang tercatat lebih besar pada belanja dalam LRA 2020 dengan selisih 25.313.043.893. Hal ini disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen yang tertera dalam laporan tersebut. LRA menggunakan basis kas dan pencatatan aset modal yang diakui sebagai belanja modal, sedangkan LO menggunakan basis akrual dan pencatatan aset modal tidak diakui sebagai beban melainkan diakui sebagai aset.

C.Perbandingan Surplus/Defisit dalam LRA dan LO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH SURPLUS/DEFISIT** | (37.534.892.097,00) | (30.645.487.705,58) | 10,10% | 6.889.404.391 |

Nilai Surplus/Defisit yang dilaporkan pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Surplus/Defisit pada LRA dilaporkan lebih besar dari LO sebesar RP6.889.404.391. Hal ini dikarenakan perbedaan basis yang digunakan sehingga terjadi perbedaan pelaporan nilai pendapatan dan beban/belanja yang berdampak pada surplus/defisit. Pada **LRA Surplus/Defisit** diperoleh dari **Total penerimaan kas dikurangi Total pengeluaran kas**, sedangakan dalam **LO Surplus/Defisit** diperoleh dari **Total pendapatan yang diakui dikurangi Total beban yang diakui**.

1. **Analisis LKPD Kabupaten Blora**
2. Menganalisis pengaruh belanja modal dalam LRA dan beban modal dalam LO terhadap kenaikan aset tetap dalam neraca pada tahun yang sama. Berikut penyajian LRA dan LO tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Blora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LRA** | **2020** | **2019** | **%** |
| **BELANJA MODAL** |  |  |  |
| **JUMLAH BELANJA MODAL** | **349.064.685.820** | **466.887.348.008** | **-25,24%** |
|  |  |  |  |
| **LO** |  |  |  |
| **BEBAN MODAL** |  |  |  |
| Beban Pemeliharaan | 27.261.458.772 | 20.985.328.616 |  |
| Beban Bunga | 0 | 0 |  |
| Beban Penyusutan & Amortisasi |  |  |  |
| **JUMLAH BEBAN MODAL** | 27.261.458.772 | 20.985.328.616 | **30%** |

Penurunan aset tetap pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar -25,24%. Sedangkan kenaikan aset tetap pada Laporan Operasional adalah sebesar 30%. Perbedaan antara nilai kenaikan aset tetap pada LRA dan LO dikarenakan LRA hanya mencatat realisasi pada tahun tersebut, sedangkan LO juga mencatat beban dari aset tetap tahun sebelumnya.

1. Membandingkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan LO (Laporan Operasi)

A. Perbandingan pendapatan LRA dengan pendapatan dalam LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | 2.127.946.961.535,00 | 2.086.414.846.690,20 | 0,99% | 41.532.114.845 |

Nilai pendapatan yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Pendapatan lebih besar dicatat pada LRA sebesar 0,99% Umumnya LO akan mencatat nilai pendapatan lebih besar karena menggunakan basis akrual, namun besarnya pendapatan pada LRA terjadi karena adanya pendapatan yang diakui oleh LRA dan tidak diakui oleh LO.

B. Perbandingan Belanja dalam LRA dengan beban dalam LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH BELANJA/BEBAN** | 2.101.653.287.754,00 | 1.710.188.925.784,48 | -10,27% | - 391.464.361.970 |

Nilai belanja/beban yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Beban lebih besar dicatat pada LRA sebesar Rp391.464.361.970. Hal ini dikarenakan perbedaan penggunaan basis, dimana LO menggunakan basis akrual sehingga mengakui beban secara keseluruhan termasuk yang diterima dimuka sedangakan belanja modal akan diakui sebagai aset bukan beban/belanja.

C. Perbandingan Surplus/Defisit dalam LRA dan LO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LRA** | **LO** | **%** | **Selisih** |
| **JUMLAH SURPLUS/DEFISIT** | 18.824.073.781,00 | 107.338.820.424,60 | 70,16% | 88.514.746.644 |

Nilai Surplus/Defisit yang dilaporkan pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Surplus/Defisit pada LO dilaporkan lebih besar dari LRA dengan selisih sebesar RP88.514.746.644. Hal ini dikarenakan perbedaan basis yang digunakan sehingga terjadi perbedaan pelaporan nilai pendapatan dan beban/belanja yang berdampak pada surplus/defisit.

1. **Perbandingan LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora**
2. Urutan Penyajian LKPD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAP PP No.71 Tahun 2010** | **LKPD Kab. Lima puluh kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| LHP Atas Laporan Keuangan | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Laporan Realisasi Anggaran | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Neraca | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Laporan Operasional | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Laporan Arus Kas | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Laporan Perubahan Ekuitas | *Sesuai* | *Sesuai* |
| Catatan Atas Laporan Keuangan | *Sesuai* | *Sesuai* |

Terdapat perbedaan penyajian LKPD antara LKPD Kab. Lima Puluh Kota dan LKPD Kab. Blora, namun perbedaan ini tidak melenceng dari Standar yang berlaku. Dimana pada LKPD Kab. Lima Puluh Kota disajikan informasi yang lebih detail mengenai kondisi keuangan disana, seperti adanya "PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN" yang pada LKPD Kab. Tanggamus tidak disajikan.

1. Komponen LKPD
2. Pembandingan akun dalam neraca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LKPD Kab. Lima Puluh Kota** | **Aset Tetap** | **Aset Lancar** |
| Tanah | kas dan setara kas |
| Peralatan dan Mesin | kas daerah |
| Gedung dan Bangunan | Kas di Bendahara Penerimaan |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | kas di Bendahara Pengeluaran |
| Aset Tetap Lainnya | kas di BLUD RSUD |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | kas di BLUD puskesmas |
| Akumulasi Penyusutan Aset tetap | kas Dana BOS |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | kas lainnya |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | putang pendapatan |
| Akumulasi Penyusutan JJ | piutang pajak |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | piutang retribusi |
|  |  | piutang hasil pengel.kekayaan daerah yang dipisahkan |
|  |  | piutang lain lain PAD yang sah |
|  |  | piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan |
|  |  | piutang transfer pemerintah lainnya |
|  |  | piutang transfer pemerintah daerah lainnya |
|  |  | piutang pendapatan bagi hasil pajak |
|  |  | penyisihan piutang |
|  |  | penyisihan piutang pendapatan |
|  |  | persediaan |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **LKPD Kab. Blora** | **Aset Tetap** | **Aset Lancar** |
| Tanah | Kas di Kas Daerah |
| Peralatan dan Mesin | Kas di Bendahara Penerimaan |
| Gedung dan Bangunan | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Kas di JKN |
| Aset Tetap Lainnya | Kas di BLUD |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | Kas Lainnya |
| Akumulasi Penyusutan tetap | Kas setara kas |
|  | Piutang Pajak |
|  | penyisihan piutang pajak |
|  | Piutang Pajak Netto |
|  | Piutang Retribusi |
|  | Penyisihan Piutang Retribusi |
|  | Piutang Retribusi Netto |
|  | piutang lainnya |
|  | penyisihan piutang lainnya |
|  | piutang lainnya neto |
|  | belanja dibayar dimuka |
|  | persediaan |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LKPD Kab. Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| Kas | 15.145.768.088,53 | 78.672.318.539 |
| Kenaikan/Penurunan Aset Lancar | - 3.261.896.523 | - 15.129.072.206 |
| Kenaikan/Penurunan Investasi Jangka Panjang | - 430.251.981.114 | - 36.983.643.744 |
| Kenaikan/Penurunan Aset Tetap | 21.995.554.444 | 91.660.836.694 |
| Kenaikan/Penurunan Kewajiban | - 3.529.600.003 | - 10.344.424.066 |
|  |  |  |
|  | **STATUS** | |
|  | **LKPD Kab. Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| Kenaikan/Penurunan Aset Lancar | *Turun* | *Turun* |
| Kenaikan/Penurunan Investasi Jangka Panjang | *Turun* | *Turun* |
| Kenaikan/Penurunan Aset Tetap | *Naik* | *Naik* |
| Kenaikan/Penurunan Kewajiban | *Turun* | *Turun* |

1. Pembandingan akun dalam LRA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **LKPD Kab.Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| Pendapatan Pajak Daerah | Pendapatan Pajak Daerah |
| Pendapatan Retribusi Daerah | Pendapatan Retribusi Daerah |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |
|  |  |  |
| **Proporsi PAD Terhadap Pendapatan** | **LKPD Kab. Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. BLora** |
| Jumlah PAD | 86.666.035.373 | 600.375.320.603 |
| Jumlah Pendapatan | 1.260.169.657.778 | 2.127.946.961.535 |
| **Proporsi PAD Terhadap Pendapatan** | **7%** | **28%** |
|  |  |  |
| **SURPLUS/DEFISIT PAD** | **Jumlah** | **Status** |
| **LKPD Kab.Lima Puluh Kota** | 7.646.192.795 | *Defisit* |
| **LKPD Kab. Blora** | 18.824.073.781 | *Surplus* |

1. Pembandingan akun dalam LO

* Pendapatan LRA dan LO kedua daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LKPD Kab.Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| **Pendapatan LRA** | 1.260.169.657.778,00 | 2.127.946.961.535 |
| **Pendapatan LO** | 1.148.425.953.675,61 | 1.854.337.479.218 |
| **Surplus Pada LRA** | 111.743.704.102,39 | 273.609.482.317 |
| **Percentage%** | **5%** | **7%** |

* Belanja/beban LRA dan LO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LKPD Kab Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| **Belanja LRA** | 1.143.091.242.841,00 | 2.218.621.748.586 |
| **Belanja LO** | 1.117.778.198.948,03 | 1.746.998.658.793 |
| **Surplus Pada LO** | -25.313.043.892,97 | -471.623.089.793 |
| **Percentage%** | **-1,12%** | **-11,89%** |

Perbandingan pendapatan pada LRA & LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan pada Kab. Blora lebih besar dengan nilai 7% dibandikan dengan Kab. Lima puluh kota sebesar 5%.

Perbandingan belanja pada LRA & Beban pada LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbandingan lebih besar pada Kab. Blora sebesar 11,89% dibanding Kab. Lima puluh kota sebesar 1,12%.

1. Pembandingan penyajian CALK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LKPD Kab.Lima Puluh Kota** | **LKPD Kab. Blora** |
| **Bab 1 Pendahuluan** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Latar Belakang | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Maksud dan Tujuan | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Landasan Hukum | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan | *Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Sistematika Penulisan | *Tersedia* | *Tersedia* |
|  |  |  |
| **Bab 2 Perkembangan Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Perkembangan Ekonomi Makro | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Kebijakan Keuangan Daerah | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Perubahan APBD | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Pencapaian target kinerja APBD | *Tersedia* | *Tersedia* |
|  |  |  |
| **Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target  yang telah ditetapkan | *Tidak Tersedia* | *Tersedia* |
| Rasio Antar Pos Neraca | *Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Rasio Antas Pos Laporan Realisasi APBD | *Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
|  |  |  |
| **Bab 4 Kebijakan Akuntansi** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Entitas Pelaporan Keuangan Daerah | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Ikhtisar Kebijakan Akuntansi | *Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Tanggungjawa Pelaporan Keuangan | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Periode Akuntansi | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan  keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen | *Tidak Tersedia* | *Tersedia* |
| Mata Uang Pelaporan | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
| Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah | *Tidak Tersedia* | *Tidak Tersedia* |
|  |  |  |
| **Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Penjelasan Pos-Pos Neraca | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | *Tersedia* | *Tersedia* |
| Laporan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | *Tersedia* | *Tersedia* |
|  |  |  |
| **Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan** | *Tersedia* | *Tersedia* |
| **Bab 7 Penutup** | *Tersedia* | *Tersedia* |

Perbedaan lainnya terletak pada landasan hukum yang disajikan oleh kedua LKPD, dimana LKPD Kab Lima Puluh Kota menyajikan 20 hukum dan LKPD Kab Blora menyajikan 18 hukum.

1. **Kesimpulan**

Kedua kabupaten menunjukkan perbedaan dalam kinerja keuangan, yang terlihat dari berbagai indikator seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana. Kabupaten dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dilihat dari perbandingan akun dalam neraca, Kab. Lima Puluh Kota memiliki aset tetap yang lebih banyak dibandingkan Kab. Blora berdasarkan jumlah penyusutan yang ada pada Kab. Lima Puluh Kota. Perbandingan pendapatan pada LRA & LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan pada Kab. Blora lebih besar dengan nilai 7% dibandikan dengan Kab. Lima puluh kota sebesar 5%. Perbandingan belanja pada LRA & Beban pada LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbandingan lebih besar pada Kab. Blora sebesar 11,89% dibanding Kab. Lima puluh kota sebesar 1,12%.

Pada Kab. Blora dapat di harapkan mampu untuk memperbaiki kekurangan kinerja keuangan agar mampu menciptakan, mengembangkan dan memajukan serta memperbaiki agar indikator indikator di daerah tersebut seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana yang lebih baik. Sedangkan pada Kab. Lima Puluh Kota di harapkan mampu untuk menyempurnakan dan meningkatkan pendapatan dan menjaga pembelajaan agar tidak banyak keluar untuk belanja hal yang sekiranya tidak di perlukan dan memelihara segala indikator di daerah tersebut seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana yang lebih baik.

1. **Daftar Pustaka**

Bratakusumah, D. S. (2001). Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. Gramedia Pustaka Utama.

Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. Fiat Justisia, 8(1), 69-79.

Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119-136.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Nomor 30 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta